

Transforming Administration-Strengthening Innovation

TRANSFORMASI

JALUR KARIER

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH



**KERJASAMA TEKNIK PEMERINTAH JERMAN (MELALUI GIZ-GFA) DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah



PERMENPAN-RB NOMOR 42 TAHUN 2014

JABATAN FUNSIONAL AKPD

**ADALAH JABATAN FUNSIONAL YANG MEMPUNYAI RUANG LINGKUP TUGAS,
TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN ANALISIS
KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM LINGKUNGAN INSTANSI PUSAT DAN
DAERAH.**

**INSTANSI PEMBINA
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN
selaku Instansi Pembina JF AKPD
Mengelola JF AKPD

Tugas:

1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan JF AKPD.
2. Menyusun pedoman formasi JF AKPD.
3. Menetapkan standar kompetensi JF AKPD.
4. Mensosialisasikan JF AKPD.
5. Menyusun kurikulum pelatihan teknis dan fungsional AKPD.
6. Menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis AKPD.
7. Melakukan uji kompetensi terhadap AKPD untuk kenaikan jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama.
8. Mengembangkan sistem informasi JF AKPD.
9. Menyusun standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional.
10. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi AKPD.
11. Memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik AKPD.
12. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai JF AKPD.
13. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas JF AKPD.

GIZ/GFA DALAM PROGRAM TRANSFORMASI MENDUKUNG KEMENTERIAN KEUANGAN UNTUK :

- 1. MENYUSUN SISTIM MANAJEMEN AKPD**
- 2. MELATIH ASESOR**
- 3. MENDESAIN INSTRUMEN PENGENDALIAN
MUTU :**

- SISTIM INFORMASI AKPD**
- SISTIM MONEV**
- ORGANISASI PROFESI AKPD**
- CENTER OF EXCELLENCE & POLICY
SUPPORTS**

MILESTONES

a. Review/Revisi:

1. Standard Kompetensi
2. Prosedur Seleksi

b. Susun:

1. Pengelolaan Karier
2. Pengembangan Kompetensi
3. Pengelolaan Kinerja

Juknis AKPD

1. AKPD Information System
2. M & E System
3. Professional Organization
4. CoE and Policy Supports

1. Assessor Training
2. Certification
3. Piloting

Tahap III

01 Okt 2018 – 30 Sep 2019

Tahap II

01 Jul 2018 – 30 Jun 2019

Tahap I

01 Jul 2017 – 30 Jun 2018

**S I S T I M
M A N A J E M E N
A K P D**

STATUS SAAT INI

NASKAH AKADEMIK

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
ANALISIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
Mei 2018

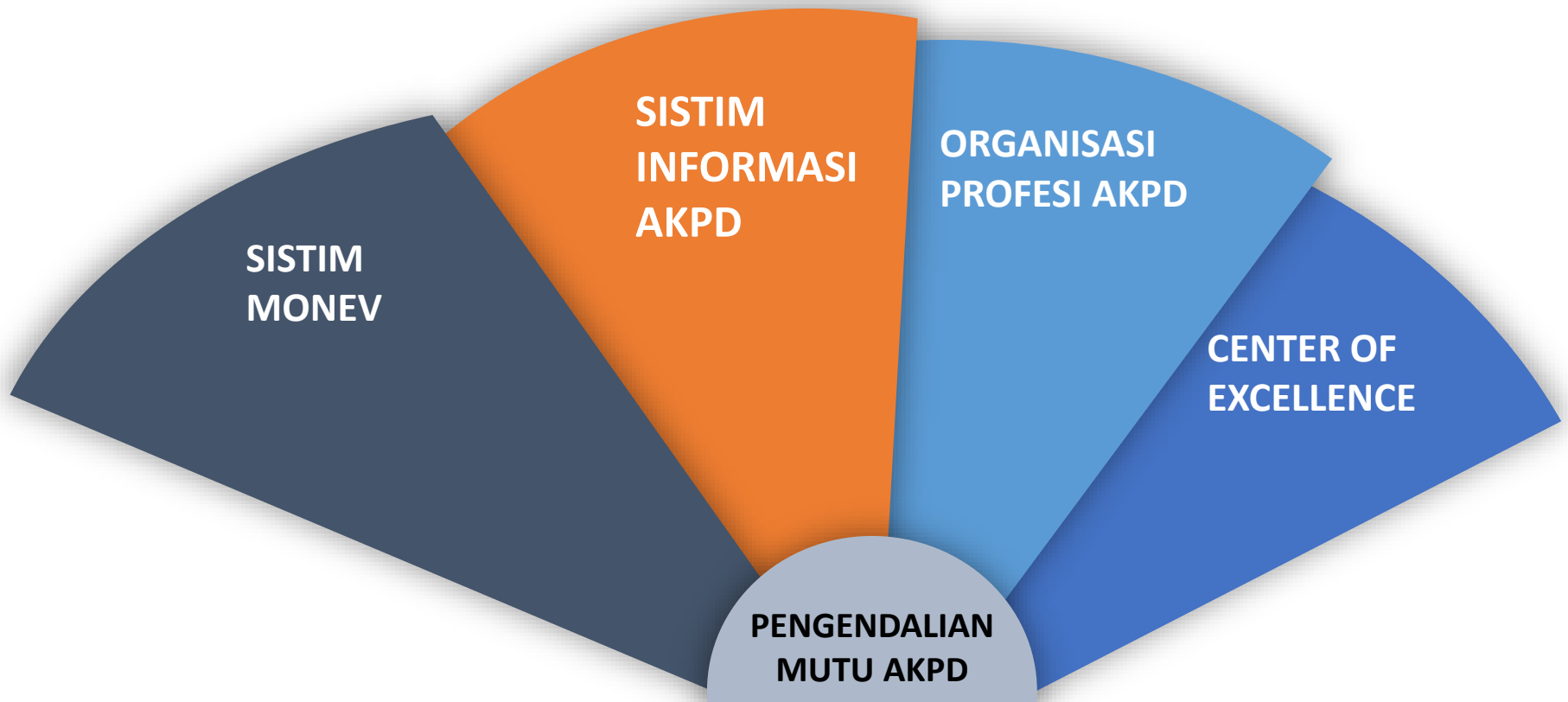
1. STANDAR KOMPETENSI JABATAN
2. PROSEDUR PENGANGKATAN
3. PENGEMBANGAN KOMPETENSI
4. PENGELOLAAN KARIER
5. PENGELOLAAN KINERJA

**PENYEMPURNAAN PMK
96/2015, PMK 171/2015,
PMK 201/2016**

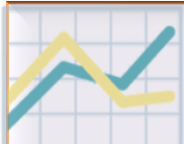
KEGIATAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN (2018-2019)

1. MELATIH ASESOR

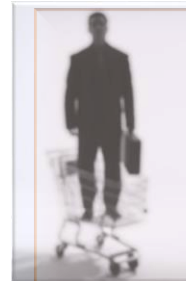
2. MENYUSUN INSTRUMEN PENGENDALIAN MUTU



URGENSI Jabatan Fungsional AKPD



Perlu analisis yang mendalam terkait keuangan pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik.



Dalam pengelolaan keuangan publik, diperlukan SDM yang handal dan independen dalam menganalisis keuangan pusat dan daerah.



Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu laporan keuangan.



Meningkatkan sinkronisasi rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

MANFAAT Jabatan Fungsional AKPD



**Kebijakan Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah
terus menerus disempurnakan.**



**Karier pegawai lebih cepat,
tidak dibatasi struktur**



**Implementasi kebijakan
keuangan lebih baik
(transparan, akuntabel,
laporan tepat waktu).**

KERANGKA HUKUM

UU NOMOR 5 Tahun 2014 Tentang ASN

PP Nomor 11/2017 Tentang Manajemen PNS

PERMENPAN-RB No. 42/2014 Tentang JF AKPD
PERMENPAN-RB No. 38/2017 Tentang SKJ Nasional

PB Menkeu&BKN No. 74&17/2015
Tentang Juknislak JF AKPD

Perpres No. 8/2017
Tentang Tunjangan JF AKPD

PMK 96/2015
Tentang Juknis JF AKPD

PMK 171/2015
Tentang Standar
Kompetensi JF AKPD

PMK 201/2016
Tentang Tatacara Inpassing JF AKPD

PMK 590/2016
Tentang Dialog Kinerja Kemenkeu

PETUNJUK TEKNIS JF AKPD (2018)

TUGAS DAN KEGIATAN AKPD

NO.	TUGAS	URAIAN
1	Tugas Pokok	Melakukan analisis keuangan pusat dan daerah
2	Lingkup Keuangan Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none">a. Manajemen penerimaanb. Manajemen pengeluaranc. Manajemen pembiayaan dan hutangd. Manajemen assete. Desentralisasi fiskal
3	Tugas Tambahan	<ul style="list-style-type: none">a. Mendukung pelaksanaan pelatihan analisis keuangan pusat dan daerah.b. Mendukung implementasi kebijakan di bidang keuangan pusat dan daerah.

KOMPETENSI JABATAN

NAMA KOMPETENSI TEKNIS		KODE KOMPETENSI
1	Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah	T.01
2	Desentralisasi Fiskal	T.02
3	Hukum Administrasi Keuangan Negara	T.03
4	Teknik Analisis	T.04
5	Teknik Menulis	T.05
6	Teknik Advokasi	T.06

NAMA KOMPETENSI MANAJERIAL		KODE KOMPETENSI
1	Integritas	M.01.
2	Kerjasama	M.02
3	Komunikasi	M.03
4	Orientasi pada Hasil	M.04
5	Pelayanan Publik	M.05
6	Pengembangan diri dan orang lain	M.06
7	Mengelola Perubahan	M.07
8	Pengambilan Keputusan	M.08

NAMA KOMPETENSI SOSIO KULTURAL		KODE KOMPETENSI
1	Perekat Bangsa	SK,01

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI JF AKPD (2016 – JULI 2018)

No	INSTANSI	UJI KOMPETENSI			KETERANGAN
		Peserta	Lulus	Diangkat	
1	KEMENKEU	246	204	57	Uji kompetensi meliputi Inpassing dan kenaikan jenjang
2	KEMENDAGRI	1	1		
3	DAERAH	266	219	60	
	JUMLAH	513	424	117	

RINCIAN PENGANGKATAN AKPD s/d JULI 2018.....(1)

No	INSTANSI	LULUS UJI KOMPETENSI	DIANGKAT AKPD
1	Kemenkeu	214	57
2	Kemendagri	1	
3	Prov Kepulauan Riau	5	
4	Prov Jambi	12	
5	Prov Kalimantan Tengah	2	
6	Prov Riau	5	
7	Prov Sumatera selatan	2	2
8	Prov Lampung	1	
9	Kota Bekasi	14	13
10	Kota Probolinggo	3	2
11	Kota Sukabumi	3	
12	Kota Padang Panjang	3	
13	Kota Payakumbuh	19	18
14	Kota Sawah Lunto	13	3
15	Kota Pekanbaru	8	

RINCIAN PENGANGKATAN AKPD s/d JULI 2018 (2)

No	INSTANSI	LULUS UJI KOMPETENSI	DIANGKAT AKPD
16	Kota Bukittinggi	4	2
17	Kota Yogyakarta	1	1
18	Kota Cilegon	2	2
19	Kota Bengkulu	3	
20	Kota Kediri	17	3
21	Kota Tomohon	1	
22	Kota Padang	1	
23	Kota Palangkaraya	1	1
24	Kabupaten Minahasa Utara	1	
25	Kabupaten Sumbawa Barat	2	2
26	Kabupaten Tulung Agung	2	2
27	Kabupaten Malang	1	
28	Kabupaten Flores Timur	2	
29	Kabupaten Banggai	2	2
30	Kabupaten Aceh Barat Daya	2	

RINCIAN PENGANGKATAN AKPD s/d JULI 2018 (3)

No	INSTANSI	LULUS UJI KOMPETENSI	DIANGKAT AKPD
31	Kabupaten Sijunjung	4	
32	Kabupaten Kepahiang	4	2
33	Kab Panajem Paser Utara	1	1
34	Kab Penukal Abab Lematang Ilir	5	
35	Kabupaten Blitar	1	
36	Kabupaten Pati	6	4
37	Kabupaten Dairi	2	
38	Kabupaten Wakatobi	1	
39	Kabupaten Cilacap	3	
40	Kabupaten Toli-Toli	1	
41	Kabupaten Brebes	1	
42	Kabupaten Sukabumi	2	
43	Kabupaten Lima Puluh Kota	14	
44	Kabupaten Dharmasraya	24	
	JUMLAH	214	117

PERSIAPAN UNTUK PENGANGKATAN JF AKPD

1. KEBIJAKAN PIMPINAN DAERAH
2. MENYUSUN KEBUTUHAN JF AKPD
3. MELAKUKAN UJI KOMPETENSI
4. MENYUSUN ANGGARAN REKRUTMEN AKPD
5. HUBUNGI INSTANSI PEMBINA:
KEMENTERIAN KEUANGAN
cq.DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

**TERIMA
KASIH**

